

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KAWASAN KUTA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PARIWISATA BALI

I Wayan Suardana

PS Usaha Perjalanan Wisata
Fakultas Pariwisata Unud
email: suardana_FPar@yahoo.com

Abstract

According to convention, tourism sector is public sector, that is a man area, but a women area is domestic sector. Based on tourism development in Bali, there are many jobs opportunity that can be entered by woman community. This research investigates the involvement of women in tourism object in Kuta region as an alternative for improving their social, cultural and economic status and roles in societies. Findings indicate that women have been involved, to a certain extent, in Kuta region. There were two different groups of women who were involved i.e. high stratum and mid and lower stratum. The formmer was actively involved in any kinds of activities including decision making as they were the owners of the attractions. The latter, although has been involved, was pasive. The respondents mostly consider that being involved in tourism destinations means that they have more power in society and family. They believed that economically they were advantageous as they can contribute to the running of the family budget. Culturally, it was believed that by being involved they had more reponsibility in preserving local culture or identity.

Keywords: empowerment, women, tourism

Pendahuluan

Pembukaan Konstitusi selaku Hukum Dasar Tertulis (UUD 1945), menyebut membebaskan bangsa dari penjajahan, membangun Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. Juga melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Berbagai pasal tentang HAM, seperti eksplisit ter-rumus dalam pasal 27 menunjuk kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, serta haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Substansi konstitusi menyiratkan kesamaan hak dan kewajiban bagi perempuanserupa dengan pria. Warga negara patut saling menerima, hormat menghormati dan membela hak baik pria maupun wanita.

Dalam satu dekade terakhir, destinasi internasional khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia mulai melakukan diversifikasi objek wisata dengan memberdayakan pengembangan wisata alternatif sebagai dampak dari peningkatan dampak negatif dari wisata massal. Bali sebagai salah satu destinasi internasional telah melakukan berbagai diversifikasi produk wisata, sebagai upaya menjawab tantangan pasar. Pergeseran pasar dari *mass tourism* ke *quality tourism* menjadikan berbagai produk pariwisata Bali mengalami modifikasi. Wisata perdesaan sebagai salah satu wisata alternatif dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat perdesaan karena dianggap bisa memberikan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, serta meningkatkan pengembangan kemampuan berusaha (Scheyvens, 2000), serta memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengontrol penggunaan sumber daya alam di daerah perdesaan sebagai salah satu aset kegiatan pariwisata.

Pada awal kegiatan pariwisata di Propinsi Bali sebagian besar wisatawan berkunjung ke Kawasan Pariwisata Kuta, dengan tujuan untuk menyaksikan pantai dan sunset serta budaya masyarakat. Sejalan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata, meningkat pula kesempatan kerja di luar sector pertanian. Saat ini pariwisata di Bali khususnya di kawasan Kuta telah berkembang dengan pesat, hal ini dilihat dari indikator perkembangan pariwisata antara lain dengan melihat pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Bali tahun 2009 mencapai 2.229.945 orang dibandingkan tahun 2000 hanya 1.412.839 orang.

Perkembangan pariwisata di Bali pada umumnya dan Kuta pada khususnya, akan banyak muncul kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh kaum perempuan. Akan semakin banyak pula kaum perempuan yang memasuki wilayah kerja kaum laki-laki, dengan konsekuensi masalah jender terus menjadi menarik. Akan tetapi fenomena ini terus berdampak pada upaya-upaya peningkatan peran perempuan dalam berbagai sektor. Beberapa tahun terakhir ini, analisis persamaan gender di sektor pariwisata secara umum sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penelitian pariwisata (Lihat Kinnaird & Hall, 1994: edisi khusus *Annals of Tourism Research* 22(2)), begitu juga pariwisata dalam kaitannya sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal (Barkin, 1999; Linberg, 2002). Namun dampak negatif pariwisata dan wisata alternatif lainnya serta kemungkinan potensi pariwisata dalam pengembangan masyarakat daerah yang terbelakang masih sangat kurang (Scheyvens, 2000). Dalam konteks Bali umumnya dan Kawasan Kuta pada khususnya, beberapa penelitian potensi pariwisata dan model pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan telah banyak dilakukan. Namun, penelitian yang mengkhususkan pada pemberdayaan perempuan dibidang pariwisata utamanya untuk meningkatkan status sosial, budaya dan ekonomi secara terpadu belum pernah dilakukan di lingkungan Kawasan Kuta.

Disamping itu, dimasa reformasi saat ini, mengidentifikasi peran perempuan di sektor pariwisata sebagai salah satu usaha pemberdayaan perempuan akan sangat bermanfaat untuk pembinaan pariwisata di Bali di masa

yang akan datang, karena berberapa alasan, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Untuk memberikan kepastian bahwa pembangunan pariwisata pedesaan yang ditawarkan harus melihat proses. Keputusan kebijakan tentang pengembangan pariwisata masa depan merupakan cerminan dan peran dari pendapat para pelaku pariwisata, termasuk didalamnya adalah perempuan dan kelompok ini benar-benar mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya atas kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya. Pola pembangunan ini disebut dengan pola pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk memberikan jaminan hak-hak perempuan terakomodasi secara baik, dalam setiap kepentingan pariwisata.
3. Untuk meyakinkan terlaksannya manajemen yang baik terhadap aset-aset pariwisata di Indonesia, seperti misalnya sumber alam, karena pariwisata memang didasarkan pada keberadaan sumber alam tersebut.
4. Untuk meyakinkan bahwa pariwisata memberikan keuntungan secara ekonomis, sosial dan budaya terhadap semua pelaku pariwisata (*stakeholders*) termasuk didalamnya adalah wanita.

Konsep pemberdayaan mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah *community driven development* (pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat). Pemberdayaan di dalam proses pembangunan harus memuat dua strategi dasar yang memadukan dua tujuan sekaligus, yaitu pertumbuhan dan pemerataan. Dalam arus kontekstual, arah pemberdayaan hanya efektif apabila ditopang oleh tiga hal yaitu:

1. Pemihakan kepada yang lemah dan pemberdayaan mereka;
2. Pemantapan otonomi dan pendelegasian pemenang dalam pengelolaan hidup; dan
3. Moderisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal.

Zeppel (1999) secara lebih luas mendefinisikan pariwisata sebagai suatu kegiatan wisata yang berdasar pada sumber daya alam yang berkelanjutan dengan memasukkan juga unsur-unsur dinamika sosial dan budaya, dimana wisatawan berinteraksi dengan masyarakat lokal di taman nasional dan daerah-daerah yang belum banyak dikembangkan. Padahal menurut Sri Agus (1999), kegiatan wisata budaya di Indonesia kebanyakan masih berjalan apa adanya karena dipengaruhi oleh rendahnya sumber daya manusia dalam merencanakan suatu paket wisata budaya. Hal ini lebih dipersulit dengan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengaruh negatif pariwisata bagi lingkungannya. Akibatnya, interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal bisa memberikan dampak sosial dan budaya baik yang positif maupun negatif pada tataran individu, keluarga, serta masyarakat (Zeppel, 1999). Berdasarkan lingkup penelitian ini, beberapa tinjauan pustaka yang erat hubungannya dengan pemanfaatan pariwisata untuk pemberdayaan masyarakat

lokal dalam konteks ini adalah perempuan dari sudut sosial, budaya dan ekonomi akan dibahas secara singkat untuk memberikan gambaran secara umum sudut pembahasan masalah.

Scheyvens (2000:236) menyatakan bahwa ada empat dimensi yang perlu dibahas untuk menentukan apakah perempuan sudah diberdayakan dalam kegiatan pariwisata, di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Keempat dimensi tersebut meliputi pemberdayaan dilihat dari sudut ekonomi, sosial, psikologi serta politik (Scheyvens, 2000). Walaupun selama ini pembicaraan mengenai pemberdayaan masyarakat lokal terhadap kegiatan pariwisata lebih banyak difokuskan pada masalah ekonomi, dalam kenyataannya pembangunan pariwisata itu merupakan kegiatan yang multidimensional, tidak hanya semata masalah ekonomi saja.

Keunggulan pariwisata dalam hal perolehan devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat tidak perlu diragukan lagi. Linberg (1999) menyatakan bahwa pariwisata mempunyai peran yang sangat besar dalam hal '*generating economic benefits*' karena pariwisata, ikut membantu penciptaan lapangan kerja di daerah terpencil yang secara ekonomis belum mendatangkan keuntungan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Meskipun kadang-kadang skalanya sangat kecil, tetap saja akan memberikan pengaruh yang cukup besar baik bagi individu maupun masyarakat. Hal tersebut pula telah mengakibatkan persaingan antar daerah, antar propinsi, antar Negara nampaknya semakin tinggi. Lebih lanjut Linberg (1999) menyatakan bahwa studi tentang pariwisata di Australia telah membuktikan adanya pengaruh positif dari sudut ekonomi, meskipun tingkat keuntungannya sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Jika membicarakan masalah pemberdayaan ekonomi dari sudut pandang pariwisata, perlu kiranya dibicarakan sektor formal dan informal serta kesempatan berusaha yang tersedia, karena, kegiatan wisata yang sifatnya musiman memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi masyarakat lokal. Terlebih lagi, sering terjadi ketidak samaan pendapatan bagi orang-orang yang dapat menimbulkan permasalahan (Wilkinson & Pratiwi, 1995). Scheyvens (2000) berpendapat bahwa, dalam hal pekerjaan formal, biasanya perempuan lokal tidak sering diikuti sertakan dalam hal pembangunan fasilitas akomodasi ataupun Daerah Tujuan Wisata (DTW). Sebagai contoh, di Zimbabwe, pembangunan taman nasional memberikan pengaruh terhadap dibangunnya fasilitas yang semakin baik, misalnya hotel serta jalan-jalan beraspal. Namun, dalam hal pekerjaan formal di bidang pariwisata tersebut, pekerja laki-laki masih mendominasi secara keseluruhan.

Di samping itu, kadang-kadang karena faktor norma sosial yang tidak memperbolehkan perempuan bekerja dalam sektor tertentu sangat berperan dalam lemahnya pemberdayaan perempuan di sektor pariwisata, seperti misalnya di Himalaya seorang guide harus seorang laki-laki, bukan wanita. Dengan begitu kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sudah terhambat oleh norma sosial yang berlaku di daerah tersebut.

Pemberdayaan secara sosial didefinisikan sebagai suatu situasi dimana rasa kesatuan dan integritas sebuah kelompok masyarakat menjadi semakin kuat

(Scheyvens, 2000). Sedangkan Rapaport (1987) menyatakan bahwa pemberdayaan sebagai suatu proses; suatu mekanisme; dalam hal ini individu, organisasi, dan masyarakatnya menjadi ahli akan masalah yang mereka hadapi. Fungsi pariwisata sebagai faktor yang menunjang pemberdayaan sosial sangatlah penting, karena dengan dibangunnya *'community-based tourism'* akan memberikan pengaruh dinamika sosial yang cukup kuat bagi kelompok masyarakat tersebut. Akibatnya, anggota masyarakat akan merasa diikutsertakan dalam kegiatan pariwisata, yang berhasil. Pemberdayaan sosial yang bisa dilihat secara langsung dan tidak langsung dengan dilakukannya kegiatan pariwisata adalah semakin terbukanya kesempatan masyarakat setempat terhadap akses umum seperti misalnya air bersih, jalan yang semakin baik serta klinik-klinik kesehatan. Sedangkan dari perspektif budaya, Zeppel (1999) berpendapat bahwa pariwisata yang dikelola dengan baik juga memungkinkan untuk digunakan sebagai suatu sarana untuk mempertahankan keberadaan budaya asli penduduk setempat.

Pemberdayaan sosial yang memadai terhadap masyarakat setempat memungkinkan mereka mempunyai kekuatan politis terhadap pembangunan fasilitas umum atau pembangunan DTW pariwisata. Lebih jauh lagi mereka akan diikutsertakan dalam proses monitoring dan evaluasi terhadap suatu kegiatan serta semakin kuatnya lobi kelompok perempuan terhadap kontrol sumber daya alam dan budaya.

Penelitian mengenai keterlibatan kaum perempuan yang telah dilakukan merujuk pada hal yang senada yaitu meskipun mereka telah dilibatkan secara aktif, posisi mereka selalu ada di bawah. Seperti yang dikatakan oleh Hall (1992:64) bahwa "*...the most prominent tourist-related issues tend to be associated with the exploitation of women,...*". Disamping itu di beberapa negara berkembang hal yang sama juga terjadi seperti misalnya di Filipina dimana rekrutings untuk para pekerja perempuan biasanya ditentukan oleh kaum pria dan pekerja perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan (*lower position*) (Chant, 1997). Beberapa ciri-ciri khusus mengenai pekerja perempuan di bidang pariwisata diantaranya adalah (1) kaum perempuan jarang mendapatkan promosi pekerjaan sampai pada tingkatan supervisor dan manajemen; (2) kaum perempuan jarang sekali bisa mengembangkan karir di bidang pariwisata ; dan (3) mereka jarang mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara profesional sebagaimana partner mereka yang bisa mencapai posisi pekerjaan yang lebih tinggi.

Berangkat dari fenomena tersebut, kegiatan penelitian ini dirancang dengan maksud utamanya untuk menjembatani gap atau kesenjangan informasi yang terjadi di sektor -pariwisata, utamanya mengenai pemberdayaan wanita, karena perempuan memang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pariwisata meski untuk konteks Indonesia peran perempuan dalam kegiatan pariwisata masih berkisar pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan domestik, seperti misalnya memasak (Satyawan & Utami, 2000). Sedangkan penyerapan tenaga kerja di bidang lain yang menuntut ketrampilan khusus masih didominasi oleh pria. Oleh karena itulah, kegiatan penelitian ini diadakan agar

bisa diketahui apakah kegiatan pariwisata yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal baik secara sosial, ekonomi dan budaya di daerah Kawasan Kuta dan sekitarnya sudah tercapai.

Metode Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dalam waktu 5 bulan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan '*key informants*' dari masing-masing kelompok '*stakeholders*' dengan menggunakan metode wawancara mendalam serta observasi lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian awal yang sifatnya uraian dan dibahas dengan teori atau konsep-konsep dan dipadukan dari data pandangan serta pendapat para orang kunci yang terlibat di bidang pariwisata di kawasan Kuta.

Data penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer yang diambil dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dan observasi lapangan (*site observations*) terhadap kegiatan pariwisata, sedangkan data sekunder berupa informasi terkait yang tersedia misalnya data statistik serta informasi dari objek pariwisata. Kedua jenis data tersebut digabungkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang sedang diteliti sehingga didapatkan gambaran yang jelas bagaimana keadaan pemberdayaan perempuan di sektor pariwisata di Kawasan Kuta. Sampel penelitian ini diambil secara purposif, yaitu menetapkan pelaku yang terlibat dalam kegiatan pariwisata di ketiga tempat wisata populer di Kawasan Kuta, yaitu Tuban, Pantai Kuta dan Legian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pariwisata merupakan sektor yang terus dikembangkan di Indonesia dan akan menjadi primadona baru dalam menunjang pembangunan nasional. Sejalan dengan pembangunan ekonomi tersebut, di Propinsi Bali sejak Pelita I sampai Pelita VI, prioritas pembangunan daerah Bali diletakkan pada sector pertanian dalam arti luas, dan sektor pariwisata yang modal dasarnya adalah kebudayaan Bali yang bersumber pada agama Hindu, serta sector industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang terkait dengan pariwisata. Kegiatan pariwisata sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan penghasilan bagi masyarakat dan devisa bagi negara sudah tidak diragukan lagi, meskipun di Indonesia sektor ini mengalami pasang surut. Seperti misalnya sebelum krisis ekonomi pariwisata menjadi sektor andalan bagi pemerintah karena memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian negara. Meskipun mengalami penurunan sejak terjadinya krisis sekaligus ketidak-stabilan politik di Indonesia paling tidak 5 juta wisatawan mancanegara dan lebih dari 100 juta perjalanan wisatawan domestik tetap merupakan faktor penggerak ekonomi yang cukup signifikan di Indonesia, juga di

wilayah Kawasan Kuta. Dengan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara yang datang, maka sektor pariwisata tetap memberikan kesempatan kerja dan berusaha masyarakat Indonesia baik formal maupun tidak formal.

Untuk mengatasi penurunan jumlah wisatawan mancanegara yang bersifat massal serta pemahaman pemerintah dan wisatawan terhadap dampak negatif pariwisata massal, akhir dekade ini telah dimulai kegiatan pariwisata yang mengarah pada *Special Interest Tourism (SIT)* yang ditandai dengan beberapa ciri khas diantaranya adalah berskala kecil, berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat lokal sehingga memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitarnya. Keberadaan fasilitas untuk pariwisata massal seperti misalnya pembangunan kompleks BTDC, Nusa Dua, Bali ternyata akhirnya tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya karena sebagian besar yang bekerja di bidang hospitality tersebut adalah masyarakat dari luar daerah tersebut. Hal ini juga terjadi di Thailand (Phuket), dimana masyarakat lokal karena keterbatasan pendidikan dan pengetahuan serta kemampuan bahasa Inggris, kalah bersaing dengan pencari kerja dari luar wilayah Phuket (Thailand Tourism Authority, 2005). Meskipun begitu, usaha yang positif telah mulai dilakukan yaitu dengan dibukanya sebuah Spa and Salon berskala internasional yang melibatkan orang lokal dengan diberi pendidikan dan sertifikasi sehingga mereka bisa bekerja di sektor tersebut (Bangkok Post, 19 October 2005).

Berkembangnya model-model SIT seperti *Community-based ecotourism enterprises* (Usaha pariwisata berbasis masyarakat) di Taman Nasional Gunung Halimun, akan memberikan manfaat ekonomis sebagai faktor pendorong utama, serta memberikan manfaat lain karena keterlibatan masyarakat lokal secara psikologis akan memberikan pengaruh kepercayaan diri yang besar bagi orang yang terlibat di dalamnya sekaligus akan memberikan rasa tanggung jawab yang besar terhadap kelangsungan kehidupan di lingkungannya (*Environmental Sustainability*) (Scheyvens, 2000). Berkembang juga jaringan ekowisata desa (JED) di Bali yang terdiri dari Desa Pelaga, Sibetan, Tengan dan Nusa Ceningan sangat memberikan usaha-usaha peningkatan peramn masyarakat local dalam pengambilan keputusan pariwisata di daerahnya. Proses pengembangan pariwisata tersebut disyaratkan melibatkan masyarakat setempat tidak hanya dalam proses inisiasi tetapi pada tahapan pelaksanaan seperti pembangunan *ecolodge* (penginapan yang memenuhi persyaratan kelestarian lingkungan) di Gunung Halimun sejak awal telah melibatkan masyarakat secara aktif. Meskipun praktek di lapangan menunjukkan beberapa kendala yang dialami oleh fasilitator, tetapi keterlibatan masyarakat setempat sangat membantu mengurangi problem yang diasosiasikan dengan pengembangan pariwisata. Di Kawasan Kuta, dan sekitarnya meskipun sangat terbatas jumlahnya, kegiatan yang mengarah ke konsep pariwisata telah dilaksanakan oleh para pelaku pariwisata. Oleh sebab itu perlu kiranya kita melihat sejauh mana keterlibatan kaum perempuan di sektor ini memberikan pengaruh baik secara sosial, budaya dan tentu saja secara, ekonomi.

Pembangunan pariwisata (pariwisata) di kawasan Kuta dan sekitarnya tidak bisa begitu saja dilepaskan dari tradisi kultural-historis yang menjadi pendukung

konteks pembangunan wilayah tersebut. Seperti telah diketahui Kuta merupakan pusat pengembangan pariwisata kerakyatan dengan mode pembangunan terbuka yang sudah barang tentu memberi nuansa kehidupan sosial budaya yang berbeda jika dibandingkan dengan konsep tertutup seperti Nusa Dua. Kesan modernisasi dan westernisasi terlihat diantara kentalnya budaya masyarakat lokal. Salah satunya adalah peran perempuan di dalam keluarga dan masyarakat.

Keterlibatan dan Peran Perempuan di Sektor Pariwisata

Keterlibatan perempuan di sektor pariwisata nampaknya memang semakin meningkat dalam segala bidang usaha pariwisata. Meskipun secara statistik nampak masih terbatas, data penelitian ini menunjukkan bahwa diantara objek pariwisata yang bisa teridentifikasi di kawasan wisata Kuta, kebanyakan telah melibatkan perempuan dalam berbagai sektor. Penelitian ini melihat keterlibatan perempuan dalam kegiatan pariwisata, dari dua sisi yaitu mereka, yang duduk sebagai pengambil keputusan (pemilik) serta mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata seperti misalnya produksi souvenir, dan penjual souvenir maupun pekerja informal.

Meskipun secara kuantitatif jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan pariwisata tidak terlalu banyak, karena sedikitnya jumlah objek yang termasuk dalam kategori pariwisata, namun secara kualitatif cukup signifikan. Data tahun 2005 diketahui bahwa dari 93 unit hotel berbintang dan 255 hotel melati tahun 2005 ternyata 73% managernya adalah laki-laki dan 27% dimiliki oleh seorang perempuan. Sedangkan pekerja perempuan (82%) dengan jabatan pekerja sebagai supervise atau sekretaris dan bagian keuangan sedangkan laki-laki pada jabatan yang sama hanya 74,6%. Dalam sudut pandangan sosial mereka ini termasuk dalam kategori strata atas dan mereka, memiliki keterlibatan yang menonjol dalam kegiatan pembangunan pariwisata. Mereka terlibat dalam bisnis perhotelan, restoran, garmen, biro perjalanan wisata, money changer, dan lain-lain. Jabatan tenaga administrasi dan sekretaris didominasi oleh perempuan (5,6%) lebih banyak dari laki-laki yang hanya (2,8%). Sedangkan posisi pimpinan 10,8% laki-laki sedangkan perempuan hanya 3,1 persen jauh di bawah pekerja laki-laki. Ada anggapan bahwa perempuan itu adalah emosional maka kaum perempuan tidak tepat sebagai pemimpin atau manager. Akan tetapi dari aspek negosiasi perana perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Dari hasil penelitian 76 % proses negosiasi usaha pariwisata diselesaikan oleh perempuan sedangkan 24% dilaksanakan langsung oleh laki-laki. Kemampuan komunikasi public dan kematangan beauty menjadi alasan utama. Mereka sering terlibat secara aktif dan ikut serta mengkoordinir kegiatan-kegiatan pariwisata dan memberikan bantuan baik secara moral maupun material. Mereka juga aktif melaksanakan kegiatan bisnisnya sampai keluar negeri dan beberapa tempat di Indonesia serta memiliki jejaring yang cukup baik diantaranya dengan konsumen dan perbankan. Disamping itu kemampuan mereka dalam berorganisasi untuk mengembangkan usaha mereka bisa dikatakan cukup baik sehingga pelan namun pasti

mereka mampu mengembangkan usaha mereka.

Nampaknya perempuan pada strata atas ini tidak memiliki masalah sama sekali dalam keterlibatannya dengan pariwisata karena kesempatan berkembang bagi mereka sama besarnya antara pria dan perempuan seperti misalnya kesempatan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari lembaga keuangan serta proses negosiasi harga dan sebagainya. Keduanya merasa bahwa mereka telah menunjukkan kemampuan yang maksimal dalam kegiatan pariwisata, meskipun masih perlu mendapatkan bimbingan dari pemerintah utamanya soal pemasaran dan manajemen pariwisata. Disamping itu masih kurangnya pemahaman mereka tentang konsep pariwisata perlu adanya pendekatan yang lebih proaktif dari beberapa pihak misalnya perguruan tinggi. Mereka berdua menganggap bahwa pariwisata hanya berhubungan dengan alam saja, padahal secara spesifik telah dikatakan bahwa pariwisata juga memasukkan unsur pelestarian seni dan budaya setempat guna mendukung kegiatan tersebut.

Kebalikannya, kaum perempuan yang terlibat dalam proses produksi dan kegiatan pariwisata termasuk dalam kelompok menengah kebawah dan keterlibatannya belum kelihatan nyata utamanya untuk pengembangan pariwisata. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal misalnya mereka tidak memiliki akses yang cukup untuk berperan aktif dalam kegiatan pariwisata atau karena kesibukannya membantu ekonomi keluarga mereka tidak memiliki waktu luang yang cukup untuk berpartisipasi aktif.

Beberapa diantara mereka sudah bekerja lebih dari enam tahun dengan posisi yang sama, meskipun ada yang menyatakan bahwa selama ini mereka mendapatkan kesempatan belajar lebih banyak, sehingga pendapatan mereka semakin meningkat seiring dengan peningkatan ketrampilan mereka memproduksi barang atau jasa di lokasi pariwisata tersebut. Pada umumnya mereka berpendapat bahwa keterlibatan perempuani bidang pariwisata masih sangat terbatas dengan berbagai alasan seperti yang disebut diatas yaitu sosio-budaya, keterbatasan kemampuan dan keterbatasan waktu yang mereka punyai. Mereka merasa bekerja dengan keadaan yang sekarang sudah cukup baik, dibandingkan jika tidak bekerja atau tidak berpenghasilan. Hal ini merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh perempuan pada umumnya, yang menganggap bekerja berapapun pendapatannya lebih baik ketimbang tidak bekerja sama sekali.

Secara singkat bisa dirangkum bahwa untuk strata atas keterlibatan dan peran perempuan cukup tinggi dan mereka memiliki jaringan kerja yang cukup baik, mempekerjakan pekerja tetap minimal tiga atau empat orang, dengan modal yang terbatas. Sedangkan untuk strata menengah dan bawah, keterlibatan perempuan dalam kegiatan pariwisata masih sangat terbatas hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya saja. Mereka biasanya tidak memiliki akses sama sekali terhadap kesempatan untuk pembangunan pariwisata disamping tidak memiliki pengetahuan yang cukup dibidang tersebut. Nampaknya dunia pariwisata dan pariwisata pada umumnya, yang didominasi oleh kaum pria, sudah semestinya memikirkan untuk melibatkan perempuan sehingga akses untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pariwisata bisa terbuka yang pada akhirnya memberikan nuansa yang tidak bias

gender di dunia pariwisata di Indonesia.

Keterlibatan Perempuan Menunjang Peran dan Status Perempuan secara Ekonomis

Seperti yang dikatakan oleh Linberg (1999) bahwa kegiatan pariwisata memberikan peran yang sangat besar dalam hal 'generating economic benefits' hal itu tampak pada hasil penelitian ini. Sebagian besar informan menyatakan bahwa dengan mengusahakan dan bekerja dibidang pariwisata, secara umum mereka mendapatkan penghasilan yang cukup memadai. Meski hanya sebagai income tambahan dalam keluarga peran pariwisata ini sangat besar secara psikologis memberikan kenyamanan karena mendapatkan income tambahan sehingga keuangan keluarga bisa terbantu. Secara umum, pariwisata mengenal 'seasonality' dimana pada saat tertentu barang atau jasa yang ditawarkan juga akan mendapatkan pengaruh tersebut. Tetapi sebagian besar informan mengatakan bahwa selama ini pekerjaan mereka tidak begitu mengenal tinggi rendah. Mereka tetap terus bekerja dan mendapatkan penghasilan.

Dari hasil penelitian ternyata diketahui bahwa pekerja perempuan lebih banyak mengisi kesempatan kerja pada jenis usaha kios (14,3%), sementara laki-laki hanya 9,2%. Pada sector jasa pekerja perempuan terkonsentrasi pada jenis usaha restoran dan souvenir (36,6%) dan jenis warung makan (6,3%). Pekerja perempuan ini lebih banyak terlibat, karena kegiatan pada kedua jenis usaha ini relative tidak memerlukan keterampilan khusus.

Responden juga menyatakan bahwa secara ekonomis memang telah menghasilkan, tetapi beberapa diantaranya menghendaki kenaikan gaji secara teratur, agar mereka bisa menyesuaikan dengan kebutuhan keluarga mereka. Dalam konteks ini bisa dikatakan bahwa karena rata-rata perusahaan berskala kecil maka penentuan upah minimum tidak seperti perusahaan besar yang diatur oleh pemerintah. Penentuan jumlah gaji biasanya ditentukan oleh pemilik tanpa mendapat persetujuan dari para pekerja. Namun apa tenaga yang dikeluarkan telah sesuai dengan pendapatan.

Pendapatan mereka rata-rata hanya sebagai income tambahan dalam keluarga dan mereka menyatakan bahwa dengan mempunyai penghasilan sendiri mereka merasa mempunyai hal yang tidak jauh berbeda dengan suami/partner dalam mengambil keputusan dalam keluarga. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pariwisata memberikan manfaat ekonomis bagi penduduk lokal, meskipun satu diantara mereka berasal dari tempat lain (30 km dari tempat bekerja) tapi sekarang telah menetap disekitar tempat usaha tersebut.

Disamping itu Scheyvens (2000) menyatakan bahwa biasanya para perempuan ini tidak termasuk dalam pekerjaan formal dan ini juga sangat jelas dalam penelitian ini. Berdasarkan status pekerjaan pekerja perempuan lebih banyak terlibat pada jenis kegiatan yang termasuk sector informal (21,%) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja laki-laki (14,1%). Semua responden berkedudukan sebagai pekerja biasa tidak dengan kedudukan tertentu, meski ada satu yang berfungsi ganda yaitu sebagai pekerja bagian produksi

sekaligus 'humas' karena dialah yang bertanggung jawab ketika ada klien dan pimpinannya tidak berada ditempat. Dengan adanya pariwisata di suatu empat, diharapkan perempuan lebih bias dilibatkan secara aktif tidak hanya sebagai pekerja saja tetapi peningkatan peran serta status mereka. Dalam hal 'formal employment' pengalaman di daerah lain menunjukkan bahwa perempuan biasanya tidak begitu dilirik sehingga seringkali menimbulkan permasalahan disekitar tempat tersebut. Berdasarkan jabatan pekerjaan, pekerja perempuan mengalami marjinalisasi sebagai proses feminisasi atau segregasi (Wirartha, 2002.). Hal ini terlihat dari terkonsentrasinya pekerja perempuan ke dalam jabatan yang seolah-olah merupakan pekerjaan perempuan. Seperti sekretaris, humas, pedagang, dan pekerjaan domestic/rumah tangga.

Suatu contoh terjadi di Zimbabwe, dimana dua hotel chain besar dibangun dan ternyata mereka tidak melibatkan perempuan lokal. Hal ini yang menyebabkan masyarakat setempat berburu binatang secara besar-besaran dengan asumsi bahwa jika tidak ada binatang yang bisa dilihat wisatawan tidak akan datang ketempat tersebut. Hal seperti ini sudah seharusnya dihindari dengan cara aktif melibatkan penduduk lokal termasuk didalamnya wanita.

Keterlibatan dan Peran Perempuan Menunjang Peran dan Status secara Sosial dan Budaya

Keterlibatan seorang perempuan dalam bekerja termotivasi oleh alasan ekonomi dan sosial. Secara umum perempuan bekerja dengan alasan seperti misalnya untuk mencari tambahan penghasilan keluarga atau untuk alasan pribadi seperti meningkatkan peran dan status mereka dalam masyarakat. Dengan bekerja di sektor pariwisata, perempuan mendapatkan tambahan pengetahuan secara tidak langsung, seperti misalnya kemampuan (skills) berkomunikasi dengan orang asing, kemampuan manajemen semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya kemampuan tersebut mereka secara sosial mempunyai '*bargaining power*' yang lebih baik. Dengan bekerja mereka merasa memiliki nilai tambah (*added value*) di dalam masyarakat. Hal ini membuat mereka merasa lebih dihargai ketimbang hanya sebagai ibu rumah tangga biasa atau, sebagai perempuan yang tidak bekerja. Dengan keterlibatan di dunia pariwisata, dalam hal ini pariwisata, responden juga yakin bahwa masyarakat lebih menghargai sehingga lebih bisa berperanserta dalam kegiatan sosial di lingkungannya seperti misalnya banjar atau, PKK serta lebih mempunyai kepercayaan diri karena merasa mempunyai kelebihan di banding dengan mereka yang tidak bekerja.

Disamping itu Scheyvens (2000) menyatakan bahwa dengan bekerja dan bergabung dalam kelompok, maka fungsi pemberdayaan sosial bisa meningkat. Rasa kesatuan dan persatuan karena terikat dalam kegiatan yang sama akan memberikan dinamika sosial yang lebih tinggi yang pada gilirannya masing-masing individu merasa diikutsertakan dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan. Para perempuan inipun merasa bahwa mereka diperlakukan sesuai dengan kemampuannya bukan karena mereka wanita. Secara umum responden menyatakan bahwa keterlibatan dalam pengembangan kemampuan di tempat bekerja memberikan suatu, kepuasan pada mereka

sehingga bisa memproduksi secara lebih bagus dimasa yang akan datang. Dari dalam keluarga para perempuan ini menyatakan bahwa mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam keluarga karena kebanyakan mereka diberi hak yang sama dalam mengambil keputusan-keputusan yang diambil dalam keluarga. Hal ini penting karena secara sosial budaya masyarakat Kuta menganggap perempuan posisinya lebih rendah dari kaum lelaki, sehingga mereka tidak diberi tanggung jawab yang besar baik di rumah maupun ditempat kerja. Sayangnya persepsi pekerja perempuan juga tidak jauh berbeda dengan pendapat para stakeholder pariwisata sehingga merekapun merasa baik-baik saja jika, diperlakukan tidak sama karena mereka wanita. Meski begitu ada beberapa informan yang menyatakan bahwa kesempatan mereka untuk berkembang sama besamya dengan kaum pria. Para perempuan yang belum memiliki peluang untuk berperan serta dalam pengembangan pariwisata pada umumnya menyatakan keinginannya untuk mengembangkan kemampuan sehingga secara sosial mereka lebih dihargai. Keterlibatan tersebut bisa keterlibatan aktif maupun aspiratif. Pertama mereka menyatakan perlu ikut berperan serta memberikan atau meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang arti penting pariwisata/pariwisata dan mendorong mereka untuk lebih banyak terlibat di dalamnya karena pariwisata membuka peluang kesempatan kerja bagi kaum wanita. Kedua diperlukan dorongan dan motivasi dari para stakeholder dibidang pariwisata agar keinginan perempuan untuk lebih terlibat dalam pariwisata difasilitasi sehingga keinginan tersebut bisa terwujud.

Dalam skala yang lebih luas, peningkatan status sosial dalam masyarakat karena, berperan serta dalam kegiatan pariwisata ada dua yaitu secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama misalnya dengan bekerja mereka mendapatkan keuntungan ekonomis sehingga kehidupan keluarga akan terjamin, sedangkan pengaruh yang tidak langsung termasuk kesempatan mendapatkan akses yang lebih bagus terhadap fasilitas - fasilitas umum seperti misalnya sarana, air bersih, jalan yang semakin baik serta akses terhadap klinik — klinik kesehatan. Pariwisata yang efektif sebagai kegiatan yang berbasis masyarakat semestinya memberikan keuntungan bagi masyarakat, karena sebagian dari kegiatan mereka disisihkan untuk kegiatan konservasi alam jika kegiatan pariwisata melibatkan alam sebagai basis kegiatannya. Kegiatan pariwisata berbasis masyarakat di Taman Nasional Gunung Halimun misalnya menyisihkan sekitar 10% hasil keuntungan untuk konservasi alam.

Dalam beberapa konteks sosial, perempuan kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan ekonomis karena norma sosial masyarakat setempat menganggap bahwa dengan bekerja di sektor pariwisata, mereka mendapatkan cap buruk di dalam masyarakat. Misalnya di daerah Himalaya (Lama, 1998) dan di Pangandaran, Jawa Barat (Wilkinson & Pratiwi, 1995) profesi guide biasanya adalah pria. Perempuan yang berprofesi sebagai guide maka mereka akan dicap sebagai 'pelacur' yang hanya tertarik untuk berhubungan dengan wisatawan asing.

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan pariwisata juga bisa menguntungkan secara kultural. Misalnya dengan terlibat di dalamnya, para pekerja perempuan akan mulai mengenal hasil karya seni dan budaya serta

kegiatan - kegiatan budaya yang mendukung pariwisata, karena seni dan budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari pariwisata. Mereka merasa bahwa kegiatan di bidang ini membawa pandangan kearah budaya positif dan hal ini akan membawa kaum perempuan kearah pemberdayaan perempuan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perkembangan budaya. Di Panama, perempuan dianggap sebagai penjaga kemurnian budaya lokal, sehingga dengan kesadaran tinggi mereka akan tetap mempertahankan kemurnian budaya. Para responden mengatakan bahwa dengan bekerja di sektor pariwisata, mereka tambah mencintai budaya lokal seperti ke banjar, kesenian dan odalan sebagai salah satu produk budaya lokal. Para responden juga mengharapkan agar mereka lebih sering dilibatkan dalam acara - acara budaya sehingga mereka, lebih bisa dikenal oleh masyarakat sehingga, peluang mereka untuk memproduksi hasil karya bisa lebih banyak serta memberikan peluang pekerjaan bagi perempuan lain di sektor ini.

Dalam konteks nasional, di Bali 'Sua Bali' yang merupakan inisiatif yang didirikan oleh dan untuk wanita, menetapkan bahwa setiap wisatawan yang datang ke desa mereka harus membayar \$1 untuk mendukung kegiatan - kegiatan keagamaan dan budaya di desa tersebut di samping untuk membantu masyarakat yang mengalami masalah hidup seperti karena sakit (Mas dalam Scheyvens, 2000). Dalam konteks yang lebih abstrak, keterlibatan perempuan dalam kegiatan pariwisata dalam jangka panjang bisa memberikan penghargaan yang lebih tinggi terhadap perempuan sehingga pemahaman masyarakat terhadap perempuan yang 'stereotipe' bisa mulai bergeser.

Peluang dan Tantangan dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Kuta

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa peluang dan kendala yang dihadapi oleh perempuan untuk bisa secara aktif terlibat dalam kegiatan pariwisata. Diantaranya adalah untuk kelompok strata atas memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok strata menengah dan bawah. Kesempatan untuk mengembangkan potensi pribadi cukup besar yang nantinya bermanfaat bagi kegiatan pariwisata dan perempuan yang terlibat di dalamnya. Secara umum mereka beranggapan bahwa peluang perlu ditingkatkan terutama oleh pemerintah untuk melibatkan mereka secara aktif dalam kegiatan riil seperti misalnya pameran pariwisata tingkat nasional dan internasional. Pengembangan jejaring juga cukup penting untuk dilakukan terutama atas bantuan pemerintah agar pemasaran produk atau jasa bisa berkembang lebih luas.

Namun untuk kelompok yang satunya, kendala yang dihadapi lumayan besar, karena mereka memiliki keterbatasan antara lain kreativitas yang kurang, ketegasan, dan akses baik untuk akses produksi dan jasa serta akses pemasaran. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan support dari pemerintah, tidak hanya untuk pengembangan produk tetapi pemasaran serta peningkatan kemampuan (*skills*) dengan cara training serta kursus sangatlah diperlukan. Hal ini akan

meningkatkan kemampuan mereka dalam berproduksi sehingga kesejahteraan mereka akan lebih terjaga.

Disamping akses terhadap kesempatan untuk berkembang menuju keadaan yang lebih baik, keterbatasan dana, ketenagakerjaan, profesionalisme kerja dan kualitas produk pariwisata merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kendala yang dihadapi oleh mereka yang berada di strata menengah dan bawah. Dengan memberikan bantuan berupa training misalnya, para pekerja pariwisata bisa meningkatkan kemampuannya dibidang tersebut untuk selanjutnya dipakai sebagai pengembangan pariwisata di daerah eks Kawasan Kuta. Lebih lanjut harus ada beberapa pihak yang membantu percepatan kemampuan mereka supaya lebih maju misalnya pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta yang mempunyai hubungan dengan pariwisata.

Hal yang lebih menguntungkan dalam konteks pariwisata di Kawasan Kuta bahwa peluang untuk lebih terlibat dalam pariwisata terbuka lebar karena kaum lelaki yang nota bene biasanya merupakan kelompok yang dominan tidak keberatan istri atau pasangannya bekerja. Hal ini nampak dari pendapat responden yang menyatakan bahwa partner mereka tidak melarang ketika mereka ingin tetap kerja setelah menikah. Ini berarti bahwa peluangnya sangat besar. Dari kaum perempuan strata atas, nampak sekali bahwa mereka telah mempunyai kontrol yang cukup kuat terhadap usaha mereka.

Simpulan

Dari hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi dan kajian data sekunder, bisa disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan di sektor pariwisata di Kawasan Kuta dapat digambarkan sebagai berikut: Pertama, kelompok perempuan yang terlibat dalam pariwisata terbagi menjadi dua strata yaitu strata atas dan menengah dan bawah. Dari kelompok strata atas, keterlibatan kaum perempuan sudah cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari keaktifan mereka dalam kegiatan itu sendiri, serta tingkat keterlibatan mereka yang cukup tinggi dari kegiatan pariwisata baik tingkat regional maupun nasional. Kesempatan mereka berkembang juga cukup tinggi karena mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk memanfaatkan *resources* yang ada untuk perkembangan usaha mereka.

Kelompok bawah dan menengah, meskipun mereka telah cukup aktif terlibat, namun kesempatan mereka berkembang terhambat oleh kurangnya kemampuan mereka secara profesionalisme, skill dan pengembangan manajerial. Mereka beranggapan bahwa dengan posisi mereka pada saat ini sudah cukup baik, dibandingkan dengan keadaan mereka jika tidak bekerja. Secara umum kedua kelompok strata perempuan ini merasa bahwa keterlibatan mereka di bidang pariwisata sudah memberikan manfaat secara sosial dan budaya dan ekonomis. Dari segi sosial dan budaya, dengan aktif bekerja mereka mempunyai kesempatan yang lebih baik dalam mengutarakan pendapat serta berperan serta dalam memberikan keputusan-keputusan dalam keluarga. Dari sisi sosial, mereka juga merasa lebih mempunyai peran dalam masyarakat baik dalam kelompok-kelompok wanita, maupun dalam rumah tangga mereka. Kegiatan mereka di bidang pariwisata juga memberikan peningkatan status mereka secara

budaya. Seperti misalnya dengan aktif di bidang pariwisata, para perempuan menjadi semakin tahu bagaimana mempertahankan budaya lokal, diantaranya adalah produk kerajinan local, kesenian, dan adapt-istiadat. Hal ini tentu saja sesuai dengan fungsi dari pariwisata yang di dalamnya mencakup kegiatan kultural/budaya di dalam masyarakat disekitar daerah tujuan pariwisata. Dari segi ekonomis, sudah pasti mereka merasa mendapatkan manfaat yang baik dengan berperan serta dalam kegiatan pariwisata ini. Mereka mengatakan bahwa, meskipun pendapatan mereka tidak sangat tinggi tetapi sudah cukup membuat mereka bangga karena sebagai perempuan mereka telah memiliki penghasilan sendiri yang bisa membantu kehidupan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Propinsi Bali, dan Universitas Udayana. 2001. *Dampak Pariwisata Terhadap Aspek Sosial-Budaya Masyarakat Bali*. Hasil Penelitian. Tidak Dipublikasikan.
- Ceballos-Lascurain, H. 1996. *Tourism, Ecotourism and Protected Areas*. Gland, Switzerland: IUCN (World Conservation Union)
- Hadinoto, Kusudianto. 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: UI-Press.
- Ismayanti. 2010. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kaiser, Jr, Charles & Larry E. Helber. 1978. *Tourism Planning & Development*. Bostom: CBJ Publishing Company.
- Kinnaird, V. and Hall, D (Eds).1994. Understanding Tourism Processes: A gender-aware framework. *Tourism Management Vol. 17(2)*, 95 - 102
- Lama, W.B .1998. CMBT: Women and CBMT in the Himalaya, Submitted to Community-based Mountain Tourism Conference, as posted on the Montain Forum Discussion Archives on 05/08/99. **Available Online:** <http://www.mntforum.org/mntforum/archieve/document/discussion98/Cbmt/cbmt4/050898d>. Diakses tanggal 23/10/03.
- Linberg, K. 2002. *The Economic Impacts of Ecotourism*. **Available On-line:** <http://ecotour.csu.edu.au/ecotour/marl.htm>. **Downloaded on 3/25/02**.
- Muljadi A.J. 2009. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Satyawan, A. dan Utami, T. 2000. Pengembangan Pariwisata dan Pengaruhnya terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Wanita: Studi di Kepulauan Karimun Jawa. *Jurnal Cakra Wisata*, Vol. 1(1), 1- 13.
- Scheyvens, R. 2000. Promoting Women's Empowerment Through Involvement in Ecotourism: Experiences from the Third World. *Journal of Sustainable Tourism*, Vol. 8(3). Pp. 232 – 249.
- Tourism Thailand (2005) Bangkok Post. 19 October 2005.
- Warto 2001. Kondisi Empirik Ketenagakerjaan Bidang Pariwisata Di Kawasan Kuta. Laporan Penelitian, tidak diterbitkan, Kawasan Kuta: Universitas Sebelas Maret.
- Wilkinson, P. and Pratiwi, W.1995. Gender and Tourism in an Indonesian

- village. *Annals of Tourism Research* 22(2), 283-299.
- Wiranatha, Agung Suryawan, dkk. 2008. *Analisis Kebutuhan Akomodasi dan Transportasi Pariwisata Di Bali*. Denpasar. Puslit Kebudayaan dan Kepariwisata Unud.
- Wiratha, Ketut. 2001. *Ketidaadilan Jender Yang Dialami Pekerja Perempuan Di Daerah Pariwisata*.
- Wrihantnolo, Randy R. dan Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta; Pt Elex Media Komputindo.